



► Perda SOTK Kota Jogja disahkan

## Sejumlah dinas hilang & digabung

Oleh Jumali  
HARIAN JOGJA

**UMBULHARJO:** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja kemarin akhirnya mengesahkan Perda Struktur Organisasi Tata Kelembagaan (SOTK). Selain Asisten Sekretaris Daerah (Asekda) dari tiga menjadi dua, sejumlah dinas juga dihilangkan.

Rapat paripurna pengesahan Perda SOTK kemarin berjalan lancar. Semua fraksi menyatakan setuju terhadap perubahan lembaga tersebut.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kelembagaan, R Bagus Sumbarja, usai sidang mengatakan, sesuai hasil kesepakatan yang dihasilkan dari konsinereng yang dilakukan di Hotel Tidar, Magelang, beberapa waktu lalu, disepakati adanya pengurangan sejumlah Eselon II B [kepala dinas], dan penambahan sejumlah pegawai Eselon III B.

"Setidaknya ada tiga dinas yang dibubarkan dan digabung," katanya.

Dalam SOTK baru itu terdapat 13 dinas dari 20 dinas yang diusulkan oleh Pemkot Jogja. "SOTK baru ini lebih ramping dibandingkan yang lama sehingga diharapkan juga bisa menghemat anggaran serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik," tambahnya.

Beberapa dinas yang berubah dalam SOTK baru ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) digabung dengan Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos). Khusus untuk Badan Informasi Darah dibubarkan dan diganti dengan kantor. Sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya menjadi Dinas Pariwisata, sedangkan kebudayaan diurus oleh Kantor Kebudayaan. Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) diubah menjadi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan. Sementara Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (BKKBC) menjadi Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Dia mengungkapkan keputusan untuk menggabung dan melakukan perampingan serta penambahan

**SOTK BARU**  
Di Pemkot Jogja

Dinas Pendidikan  
 Dinas Kesehatan  
 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
 Dinas Perhubungan  
 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana  
 Dinas Pariwisata  
 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah  
 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi  
 Dinas Pajak daerah dan Pengelolaan Keuangan  
 Dinas Perzinan  
 Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup  
 Dinas Pengelolaan Pasar  
 Dinas Ketertiban.

sejumlah lembaga teknis daerah telah sesuai dengan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam aturan tersebut dinas memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas kedinasan seperti merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

Dihaturk

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Tembusan Kepada Yth :

INSTANSI	NILAI BERITA	SIFAT	TINDAK LANJUT
1. <i>Bag. Organisasi</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input checked="" type="checkbox"/> Amat segera	<input type="checkbox"/> Untuk anggaran
2. ....			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Organisasi			

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005